

Pemetaan Sistematis Faktor-Faktor Penentu Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa di Indonesia

Aditiyanto Ekaputra

Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, Indonesia

*Penulis Korespondensi: aditiyanto@feshum.ummada.ac.id

Abstract. *This study aims to systematically map the determinants of fraud prevention in village fund management in Indonesia based on the findings of previous empirical research. The method used is a Systematic Literature Review (SLR) with reference to the PRISMA protocol through a search of scientific articles published in the 2015–2025 period based on Google Scholar. The scientific articles were then selected based on predetermined inclusion and exclusion criteria to obtain ten relevant empirical articles for analysis. The results of the study indicate that the Government Internal Control System (SPIP) and the competence of village officials are the most dominant and consistent factors in preventing village fund fraud. Other supporting factors include individual morality and ethics, transparency and accountability, community participation, and a whistleblowing system that plays a role in strengthening the effectiveness of internal control through social supervision and increasing integrity. These findings confirm that preventing village fund fraud requires an integrated approach that integrates control systems, governance and individual behavior and is aligned with national policies such as the Village Law, SPIP, and Siskeudes to realize transparent, accountable, and sustainable village financial management.*

Keywords: *Fraud; Governance; SPIP; Village Apparatus Competency; Village Funds.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan secara sistematis faktor-faktor penentu pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Indonesia berdasarkan temuan penelitian empiris terdahulu. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada protokol PRISMA melalui penelusuran artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2015–2025 berbasis Google Scholar. Artikel ilmiah tersebut selanjutnya diseleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sehingga diperoleh sepuluh artikel empiris yang relevan untuk dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan kompetensi aparatur desa merupakan faktor yang paling dominan dan konsisten dalam mencegah terjadinya fraud dana desa. Faktor pendukung lainnya meliputi moralitas dan etika individu, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta sistem *whistleblowing* berperan dalam memperkuat efektivitas pengendalian internal melalui pengawasan sosial dan peningkatan integritas. Temuan ini menegaskan bahwa pencegahan fraud dana desa memerlukan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan sistem pengendalian, tata kelola dan perilaku individu serta selaras dengan kebijakan nasional seperti Undang-Undang Desa, SPIP, dan Siskeudes guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Dana Desa; Fraud; Kompetensi Aparatur Desa; SPIP; Tata Kelola Pemerintahan.

1. LATAR BELAKANG

Isu kecurangan (fraud) dalam sektor publik telah menjadi perhatian global karena dapat menghambat pembangunan, menurunkan kepercayaan masyarakat, dan mengancam tata kelola pemerintahan yang bersih (Nandeesha, 2024). Secara konseptual, fenomena fraud dijelaskan melalui Fraud Triangle Theory yang menyoroti tiga elemen utama, yaitu tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalization) yang mendorong individu untuk melakukan kecurangan. Ketiga faktor tersebut saling berinteraksi dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya penyimpangan terutama ketika sistem pengendalian dan budaya organisasi tidak dapat berjalan efektif.

Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan seperti sistem pengawasan dan regulasi untuk memperkuat akuntabilitas keuangan publik namun kasus penyimpangan

dalam pengelolaan dana desa masih kerap terjadi. Adanya pengendalian internal yang lemah berkontribusi terhadap peluang penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa (Irwan et al., 2024). Selain itu, kurangnya transparansi dalam pelaporan kerap menyebabkan lemahnya peran pengawasan oleh publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Selain itu, faktor insentif ekonomi juga turut berperan, rendahnya penghasilan dan tunjangan yang diberikan kepada perangkat desa dapat memperkuat tekanan ekonomi yang berujung pada perilaku kecurangan (Irwan et al., 2024). Oleh sebab itu dengan memperkuat komitmen kepemimpinan desa, mendorong budaya integritas, dan meningkatkan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis dalam mencegah terjadinya fraud (Wijayanti et al., 2025). Di sisi lain, penguatan program pelatihan dan penerapan sistem whistleblowing dinilai dapat memperluas saluran deteksi dini terhadap praktik kecurangan (Sutisna & Marsudi, 2024).

Berbagai penelitian empiris mengenai pencegahan fraud pada pengelolaan keuangan desa telah dilakukan, namun hasil temuan yang diperoleh masih bervariasi dan belum konsisten. Misalnya beberapa studi menegaskan bahwa pengendalian internal yang kuat berperan signifikan dalam menekan perilaku kecurangan (Nindita et al., 2023) (Murtanto et al., 2022). Selain itu, adanya kompetensi pejabat juga disebut sebagai faktor kritis. Hasil studi menunjukkan bahwa keterampilan dan pengetahuan aparat desa yang baik telah berdampak positif pada upaya pencegahan kecurangan (Muslim et al., 2025; Hati et al., 2025). Faktor seperti moralitas individu dan budaya organisasi memainkan peran moderasi dalam pencegahan penipuan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa meskipun moralitas dapat meningkatkan efektivitas pengendalian internal namun hal tersebut tidak secara seragam mempengaruhi semua aspek pencegahan kecurangan (Fitri et al., 2025) (Hati et al., 2025). Efektivitas sistem whistleblowing pun masih menjadi perdebatan, di mana sebagian penelitian menunjukkan hasil yang lemah terhadap pencegahan fraud (Muslim et al., 2025) (Fitri et al., 2025). Ketidakkonsistenan ini menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan terkait faktor-faktor penentu pencegahan fraud yang paling berpengaruh di tingkat desa. Guna menjawab variasi hasil riset-riset tersebut maka pendekatan SLR diperlukan untuk mensintesis temuan-temuan empiris secara komprehensif.

Variasi hasil penelitian tersebut perlu dipahami dalam konteks dinamika kebijakan dan sistem tata kelola keuangan desa di Indonesia yang terus berkembang. Reformasi regulasi dan penerapan berbagai instrumen pengawasan menjadi faktor penting yang turut memengaruhi efektivitas pencegahan fraud di tingkat desa. Dimensi kebijakan nasional seputar Undang-Undang Desa, SPIP (Sistem Pengelolaan Informasi Pembangunan), dan Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) mencerminkan perubahan signifikan terhadap pemberdayaan pemerintahan

daerah di Indonesia. Kerangka kerja dari sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan otonomi desa, akuntabilitas, dan pembangunan berkelanjutan serta mendorong pendekatan yang lebih partisipatif terhadap pengelolaan desa. Undang-Undang Desa 2014 mengubah desa menjadi subyek pembangunan yang menekankan pengakuan dan subsidiaritas. Hal ini memberdayakan desa dengan otoritas yang signifikan untuk mengelola urusan mereka sendiri termasuk sumber daya keuangan sehingga mampu meningkatkan pemerintahan dan kedaulatan lokal serta mendorong kemandirian dan kemakmuran (Ra'is, 2018). Sementara itu, Siskeudes memiliki peran sebagai alat untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa. Pelaksanaan Siskeudes dimaksudkan untuk memungkinkan pejabat desa mengelola keuangan secara lebih terstruktur, mengurangi kesalahan pencatatan, dan menyederhanakan pelaporan keuangan Fitria (2020) dalam (Cahayani et al., 2025).

Hingga saat ini belum terdapat kajian sistematis yang memetakan faktor-faktor pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Indonesia dengan menggunakan pendekatan SLR. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis secara sistematis berbagai faktor yang memengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa berdasarkan hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan dasar ilmiah bagi penguatan kebijakan pencegahan fraud dan peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan desa di Indonesia. Selain itu diharapkan juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi sektor publik serta menjadi rujukan praktis dalam merancang strategi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa yang lebih efektif.

2. KAJIAN TEORITIS

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah elemen penting yang melekat dalam proses pelaporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan yang disajikan secara lengkap mencakup neraca, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan yang dapat ditampilkan dalam berbagai format seperti laporan arus kas atau laporan arus dana, serta catatan atas laporan keuangan dan unsur pendukung lain yang tidak dapat dipisahkan (Herawati, 2019).

Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan kondisi dan kinerja perusahaan dalam satuan moneter sebagai dasar pengambilan keputusan, serta mencerminkan kinerja perusahaan pada periode tertentu dan kemampuannya dalam menghasilkan arus kas di masa depan (Satria dan Fatmawati, 2021).

Laporan keuangan perusahaan berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi kondisi keuangan kepada pihak berkepentingan, sehingga penyusunannya harus dilakukan secara cermat, objektif, dan bebas dari bias (Saputri et al., 2023).

Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting bagi pihak internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan, sehingga penyajiannya harus andal, relevan, serta bebas dari praktik kecurangan sesuai dengan standar pelaporan keuangan yang berlaku (Rinjani et al., 2025).

Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan tindakan yang disengaja berupa kesalahan pelaporan atau penghilangan fakta material maupun data akuntansi yang dapat menyesatkan. Apabila informasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan bersama informasi lain yang tersedia, kecurangan ini berpotensi memengaruhi dan mengubah penilaian atau keputusan para pengguna laporan keuangan (Faradiza, 2019).

Kecenderungan perusahaan melakukan kecurangan laporan keuangan umumnya dipicu oleh tuntutan untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerja guna menaikkan nilai perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan. Kondisi tersebut mendorong perusahaan melakukan praktik manajemen laba melalui berbagai metode untuk memperindah penyajian laporan keuangan demi menarik minat investor. Kecurangan cenderung akan terus terjadi apabila tidak disertai dengan upaya pencegahan maupun pendeteksian yang memadai (Ratnasari dan Rofi, 2020).

Kecurangan laporan keuangan mencerminkan penyajian kondisi keuangan suatu badan usaha yang dilakukan secara sengaja dan menyimpang, sehingga menghasilkan informasi yang tidak akurat. Tindakan ini berupa manipulasi melalui penghilangan atau perubahan nilai maupun jumlah dalam laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan para pengguna laporan keuangan (Yanti dan Monica, 2024).

Kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan salah saji yang dilakukan secara sengaja atau akibat kelalaian dalam penyajian dan pengungkapan informasi, sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi pengguna laporan keuangan (Rinjani et al., 2025).

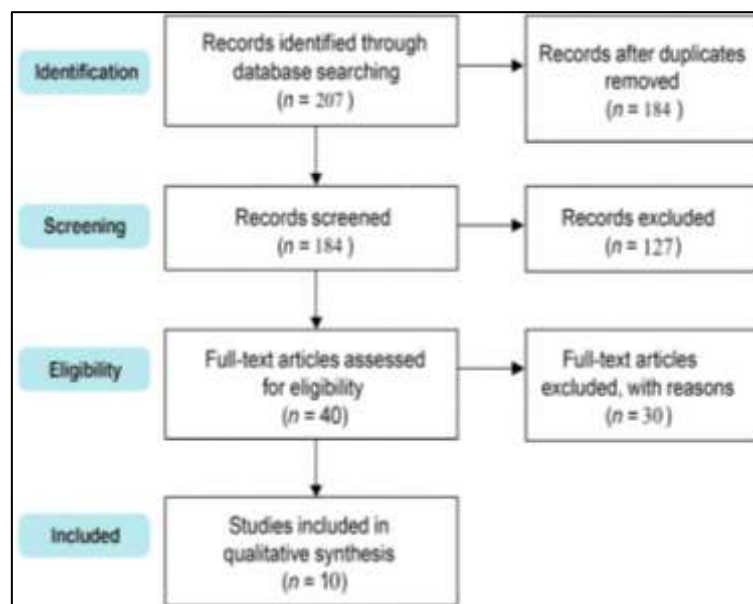
3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode SLR untuk memetakan secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Kata kunci yang digunakan adalah "pencegahan fraud" dan "dana desa" yang bersumber dari

Google Scholar. SLR dilakukan dengan mengacu pada panduan PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*) yang disajikan pada Gambar 1. Proses pencarian difokuskan pada artikel yang dipublikasikan dalam periode 2015–2025, sejalan dengan implementasi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menjadi titik awal reformasi pengelolaan keuangan desa. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria yang diterapkan dalam pencarian artikel ilmiah.

Aspek	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
Jenis publikasi	Artikel ilmiah (<i>original research</i>)	Prosiding, eprints
Konteks penelitian	Pengelolaan dana desa di Indonesia	Di luar konteks Indonesia
Tahun terbit	2015–2025	<2015
Fokus topik	Pencegahan fraud, akuntabilitas, tata kelola desa	Tidak membahas fraud atau dana desa



Gambar 1. Diagram PRISMA dalam penelusuran artikel ilmiah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil sintesis penelitian empiris terkait faktor-faktor pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa di Indonesia disajikan pada Tabel 1, dimana bagian ini merangkum variabel yang diteliti serta temuan utama dari setiap studi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang paling berpengaruh dalam mencegah terjadinya fraud di tingkat desa.

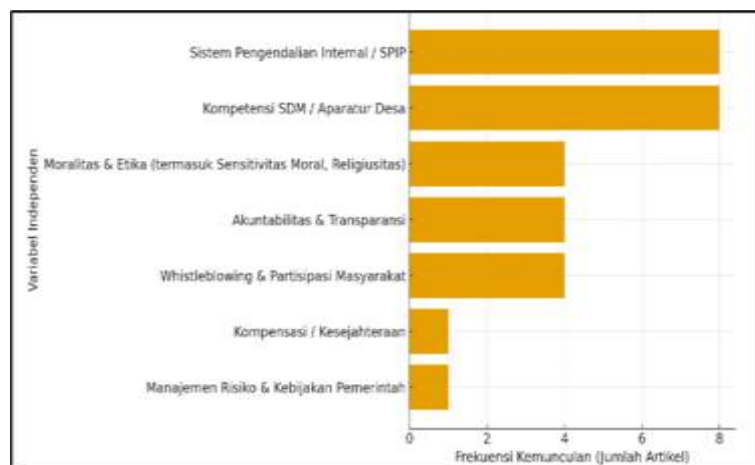
Tabel 2. Hasil Sintesis artikel ilmiah.

No	Sumber	Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	Variabel Moderasi	Temuan Utama
1	Wahyudi et al., 2022	Pencegahan Fraud Dana Desa	Sistem Pengendalian Internal, Kompensasi yang Tepat, Kompetensi Aparatur Desa	Sensitivitas Moral (moderasi)	Ketiganya signifikan terhadap pencegahan fraud. Sensitivitas moral memperkuat efek positif pengendalian internal dan kompetensi.
2	Oktafiyanti dan Auliyah., 2023	Pencegahan Penipuan	SPIP, Pelatihan & Kesadaran SDM, Kebijakan Whistleblower, Partisipasi Masyarakat	—	SPIP dan pelatihan efektif mencegah fraud. Perlu peningkatan partisipasi publik dan perlindungan whistleblower.
3	Wahyudi et al., 2021	Pencegahan Fraud	Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu, istem Pengendalian Internal, istem Whistleblowing	—	Keempat variabel berpengaruh simultan (64,8%). Whistleblower dan moralitas menjadi pelengkap pengendalian internal.
4	Ginting et al., (2022)	Pencegahan Fraud Dana Desa	Pengendalian Internal, Kompetensi Aparatur Desa	—	Keduanya berpengaruh positif dan signifikan; efek gabungan memperkuat pengawasan dana desa.
5	Ginting et al, (2024)	Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel (indikator pencegahan fraud)	Manajemen Risiko, artisipasi Masyarakat, Pengawasan Pemerintah Kecamatan, Kebijakan Desa	—	Fokus pada risiko kebijakan dan pentingnya pengawasan kecamatan untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang.
6	Biduri et al, (2022)	Pencegahan Penipuan Dana Desa	Penyajian Laporan Keuangan Desa Pengendalian Internal Kompetensi SDM	—	Ketiga variabel berpengaruh positif signifikan ($R^2 = 81,6\%$). Laporan keuangan yang transparan sangat krusial.

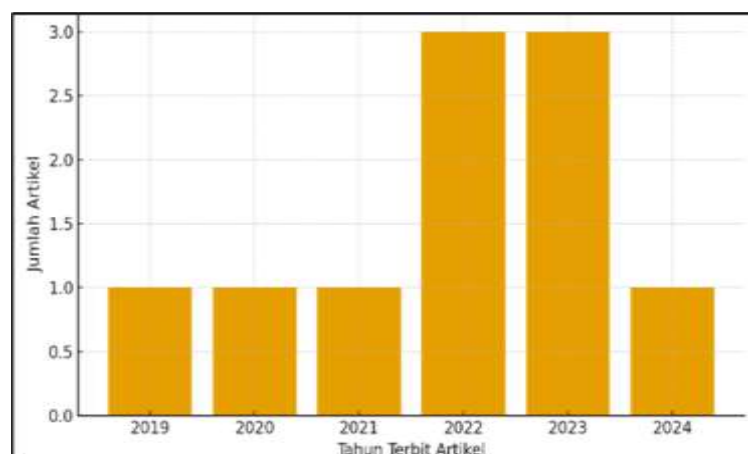
No	Sumber	Variabel Dependen (Y)	Variabel Independen (X)	Variabel Moderasi	Temuan Utama
7	<i>Faridatul et al, 2020</i>	Pencegahan Penipuan	Kompetensi Pejabat Desa Moralitas Pejabat Desa Sistem Pengendalian Internal Whistleblowing	—	Semua variabel signifikan. Whistleblowing dan moralitas memperkuat efek pengendalian internal.
8	Saputra et al, 2019	Pencegahan Fraud Dana Desa	Akuntabilitas Kompetensi SDM	—	Kedua variabel signifikan. Kompetensi SDM penting untuk mencegah asimetri informasi dan meningkatkan akuntabilitas.
9	Suryandari, (2021)	Penipuan Pengelolaan Dana Desa	Fraud Hexagon Elements (tekanan, kesempatan, rasionalisasi, arogansi, kemampuan, keserakahan) Sifat Machiavellian	Religiusitas (moderasi)	Beberapa elemen Fraud Hexagon signifikan. Religiusitas melemahkan efek sifat Machiavellian terhadap fraud.
10	Arthana (2019)	Pencegahan Fraud Dana Desa	Tata Kelola Desa Transparansi Partisipasi Masyarakat Pengawasan	—	Tata kelola dan transparansi meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa; partisipasi masyarakat memperkuat kontrol sosial.

Berdasarkan Gambar 1 terlihat bahwa faktor yang paling dominan dalam penelitian terkait pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa di Indonesia adalah SPIP dan kompetensi sumber daya manusia atau aparatur desa, masing-masing muncul sebanyak delapan kali. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas mekanisme kontrol internal dan kapasitas sumber daya manusia merupakan penentu utama dalam mencegah terjadinya kecurangan di tingkat desa. Faktor moralitas dan etika, akuntabilitas-transparansi, serta *whistleblowing* dan partisipasi masyarakat juga memiliki peran penting meskipun dengan frekuensi kemunculan lebih rendah yang menegaskan pentingnya aspek integritas dan keterlibatan publik. Sebaliknya, variabel kompensasi dan manajemen risiko serta kebijakan pemerintah relatif kurang dieksplorasi yang

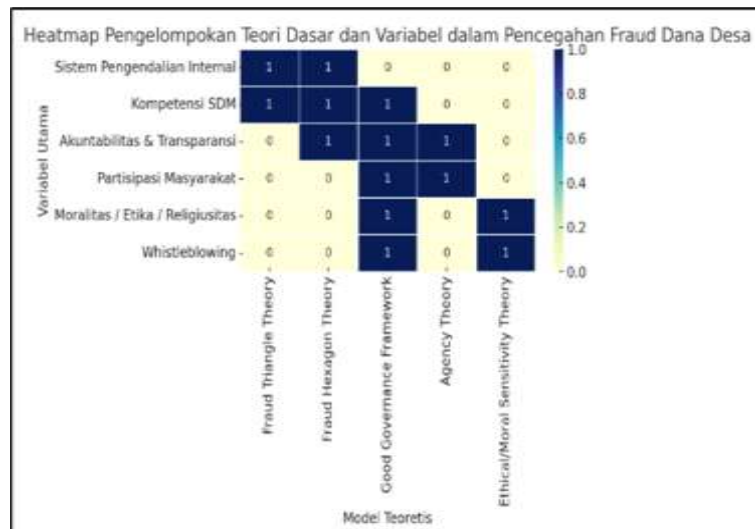
menunjukkan bahwa aspek materi dan kebijakan makro belum menjadi fokus utama dalam penelitian yang ada. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa pendekatan pencegahan fraud di tingkat desa masih bertumpu pada faktor-faktor internal desa seperti seberapa baik sistem pengendalian internal telah dijalankan dan seberapa kompeten atau berintegritas aparatur desa yang terlibat. Dengan demikian, keberhasilan pencegahan fraud sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kesadaran pihak di dalam desa sendiri untuk mengelola dana secara jujur, transparan, dan akuntabel. Sedangkan pada distribusi artikel (Gambar 2) menunjukkan terjadinya peningkatan publikasi pada 2022–2023 sebagai puncak penelitian.



Gambar 2. Frekuensi kemunculan variabel dalam 10 artiek ilmiah.



Gambar 3. Distribusi tahun terbit artikel ilmiah.



Gambar 4. Heatmap pengelompokan teori dasar dan variabel dalam pencegahan fraud.

Heatmap pada Gambar 3 menunjukkan keterkaitan antara teori dasar dan variabel utama dalam pencegahan fraud pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal dan kompetensi SDM paling banyak dikaitkan dengan *Fraud Triangle Theory* dan *Good Governance Framework*, menegaskan perannya sebagai faktor struktural utama dalam mencegah fraud. Akuntabilitas dan transparansi serta partisipasi masyarakat beririsan kuat dengan pendekatan tata kelola dan *agency theory*, yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dan pengurangan asimetri informasi. Sementara itu, variabel moralitas, etika, religiusitas, dan *whistleblowing* lebih dominan dikaitkan dengan *ethical/moral sensitivity theory*, menunjukkan bahwa dimensi perilaku dan nilai individu turut berperan penting dalam pencegahan fraud. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud dana desa memerlukan perpaduan antara sistem, tata kelola, dan moral individu.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan kerangka kebijakan nasional pengelolaan dana desa, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, SPIP, dan Siskeudes. Dominannya peran SPIP dan kompetensi aparatur desa dalam pencegahan fraud sejalan dengan mandat Undang-Undang Desa yang memberikan kewenangan luas kepada desa untuk mengelola keuangan secara mandiri sekaligus menuntut akuntabilitas dan tata kelola yang baik. SPIP berfungsi sebagai instrumen utama untuk meminimalkan peluang terjadinya fraud melalui pengendalian internal yang terstruktur, sedangkan peningkatan kompetensi aparatur desa menjadi prasyarat agar sistem tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Sementara itu, penerapan Siskeudes mendukung aspek transparansi dan akuntabilitas yang banyak diidentifikasi dalam penelitian sebagai faktor penting pencegahan fraud, terutama dalam penyajian laporan keuangan desa dan penguatan pengawasan publik. Namun demikian, hasil analisa juga menunjukkan bahwa efektivitas

kebijakan dan sistem tersebut sangat bergantung pada integritas, moralitas, dan kesadaran aparatur desa, serta partisipasi masyarakat sebagai kontrol sosial. Dengan demikian, kebijakan nasional tidak hanya perlu menekankan aspek regulatif dan sistemik, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembinaan etika publik, serta optimalisasi peran masyarakat agar tujuan pencegahan fraud dana desa dapat tercapai secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa yang dilakukan diketahui bahwa SPIP dan kompetensi aparatur desa merupakan faktor yang paling dominan dan konsisten dalam mencegah terjadinya fraud. Hal ini menegaskan bahwa perlu adanya mekanisme kontrol internal yang kuat serta kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa. Faktor pendukung lainnya seperti moralitas dan etika individu, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat serta sistem *whistleblowing* berperan dalam memperkuat efektivitas pencegahan fraud melalui pengawasan sosial dan penguatan integritas meskipun pengaruhnya masih bervariasi antar penelitian. Temuan ini mengindikasikan bahwa pencegahan fraud dana desa memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek struktural, tata kelola, dan nilai perilaku individu. Selain itu, penguatan kebijakan dan praktik pencegahan fraud perlu difokuskan tidak hanya pada sistem dan regulasi tetapi juga pada peningkatan kompetensi serta integritas aparatur desa secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Brodish, J. (2025). Fraud triangle. In P. Gupta (Ed.), *SAGE business foundations: Accounting*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9798348811693>
- Cahayani, G. P. A., Kurniawati, S. B., & Supartini, S. (2025). Factors affecting the accountability of village fund management through the implementation of the village financial system (Siskeudes) in several villages in Jatipurno District, Wonogiri Regency. *International Journal of Business, Management and Islamic Research*, 2(2), 93–104. <https://doi.org/10.62951/ijbmir.v2i2.134>
- Faradiza, S. A. (2019). Fraud pentagon dan kecurangan laporan keuangan. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(1), 1–22. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.1.1060>
- Fitri, R. A., Nasir, A., & Basri, Y. M. (2025). Factors affecting fraud prevention in village financial management with individual morality as a moderation variable. *Golden Ratio of Data in Summary*, 5(1), 86–98. <https://doi.org/10.52970/grdis.v5i1.835>
- Hati, D. P., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2025). Pengaruh sistem pengendalian internal, new public management, kompetensi, dan moralitas individu terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 4(2), 717–726. <https://doi.org/10.53088/jikab.v4i2.126>

- Herawati, H. (2019). Pentingnya laporan keuangan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(1), 16–25. <https://doi.org/10.32663/jaz.v2i1.806>
- Irwan, A. L., Fadilah, I., & Husdayanti, N. (2024). Corruption prevention management in village fund management. *Jurnal Sinar Manajemen*, 11(2), 136–142. <https://doi.org/10.56338/jsm.v11i2.5509>
- Murtanto, M., Banjarnahor, E., & Ferisanti, F. (2022). Determinants of fraud prevention in village fund management with organizational justice as moderator. *Indonesian Management & Accounting Research*, 21(1), 1–16. <https://doi.org/10.25105/imar.v21i1.13221>
- Muslim, E., Taufik, T., & Azlina, N. A. (2025). Determinan pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa dengan moralitas sebagai moderasi. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 6(2), 316–334. <https://doi.org/10.31258/current.6.2.316-334>
- Nandeesh, M. (2024). The impact of corruption on public administration: A political analysis. *ShodhKosh Journal of Visual and Performing Arts*, 5(3). <https://doi.org/10.29121/shodhkosh.v5.i3.2024.5823>
- Nindita, O., & Hasanuddin, U. (2023). The influence of compensation suitability, internal control, regulatory enforcement, and the use of information technology on fraudulent behaviour in the management of village funds. *Ministal Journal*, 2(4). <https://doi.org/10.55927/ministal.v2i4.6397>
- Ra'is, D. U. (2018). Kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam perspektif asas rekognisi dan subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. *Reformasi*, 7(1). <https://doi.org/10.33366/RFR.V7I1.695>
- Ratnasari, M., & Rofi, M. A. (2020). Faktor-faktor yang memotivasi kecurangan laporan keuangan. *Journal of Management and Business Review*, 17(1), 79–107. <https://doi.org/10.34149/jmbr.v17i1.202>
- Rinjani, S. M., Yennisa, Y., Kusumawardhamni, A., & Purnama, H. (2025). Deteksi fraud terhadap laporan keuangan dengan analisis fraud triangle pada sektor pertambangan di IDX periode 2018–2022. *UPY Business and Management Journal*, 4(1), 31–40. <https://doi.org/10.31316/ubmj.v4i1.7284>
- Saputri, H., Kusnaedi, U., & Asmana, Y. (2023). Pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan jasa di Jakarta Utara. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 102–109. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7932454>
- Satria, M. R., & Fatmawati, A. P. (2021). Penyusunan laporan keuangan perusahaan menggunakan aplikasi spreadsheet (pada PD Beras Padaringan). *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 320–338. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v3i2.146>
- Sutisna, D., & Marsudi, J. (2024). The factors influencing the prevention of fraud in village fund management: Case studies on villages in Caringin Sub-District, Bogor Regency. *Monas: Jurnal Inovasi Aparatur*, 6(1), 36–47. <https://doi.org/10.54849/monas.v6i1.210>
- Wijayanti, I. O., Herawansyah, H., Putra, D. A., & Utomo, B. (2025). Mitigating village fund fraud in Indonesia: The role of leadership, transparency, and community engagement (Study in Central Bengkulu Regency). *Open Access Indonesia Journal of Social Sciences*, 8(1), 1922–1935. <https://doi.org/10.37275/oaijs.v8i1.284>
- Yanti, L. D., & Monica, M. (2024). Strategi deteksi kecurangan dalam laporan keuangan: Analisa fraud triangle. *eCo-Fin*, 6(2), 152–165. <https://doi.org/10.32877/ef.v6i2.1258>